

**PENANGANAN DAN PROBLEMATIKA EKSEKUSI
TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN DAN PERORANGAN
DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN
DALAM TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN
SOSIOLOGI HUKUM**

DISERTASI

OLEH

**RUHANSYAH
NIM : 210311020092**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026**

**PENANGANAN DAN PROBLEMATIKA EKSEKUSI TERHADAP
JAMINAN KEBENDAAN DAN PERORANGAN DI PENGADILAN
AGAMA KALIMANTAN SELATAN DALAM TINJAUAN
ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM**

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Ilmu Syariah

Oleh :

RUHANSYAH

NIM : 210311020092

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PRORAM STUDI S-3 ILMU SYARI'AH
BANJARMASIN**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruhansyah
Nim : 210311020092
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Juli 1986
Program Studi : Ilmu Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya yang berjudul: **Penanganan Dan Problematika Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam Tinjauan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum**” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 26 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Ruhansyah

PERSETUJUAN DISERTASI

**Penanganan Dan Problematika Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan
Dan Perorangan Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam Tinjauan
Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

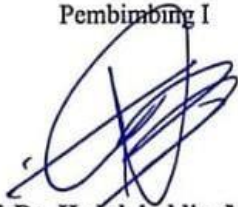
RUHANSYAH

NIM : 210311020092

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

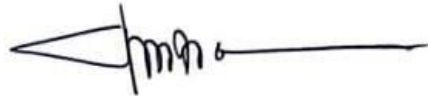
Untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

BUKTI BEBAS PLAGIASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1563/Un.14/IV/UPM-BP/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Ruhansyah
NIM	: 210311020092
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Penanganan dan Problematika Eksekusi Pada Jaminan Kebendaan dan Perorangan di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam Tinjauan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil **kurang dari 20%** Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA**.
Banjarmasin, 09 Juni 2026

Wakil Ditektur Pascasarjana



Dr. Wahyudin, M.Pd.I.

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul **“Penanganan Dan Problematika Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam Tinjauan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum”** ditulis oleh Ruhansyah NIM. 210311020092 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin:

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 Juni 2026



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1 Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Ketua)	
2 Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI (Penguji Utama)	
3 Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Penguji)	
4 Dr. Muhammad Nafi, S.Pd, S.H.I, S.H, M.Sy (Penguji Eksternal)	
5 Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H (Penguji)	
6 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (Penguji)	
7 Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, M.A (Penguji/Sekretaris)	

BUKTI BEBAS PLAGIASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1563/Un.14/IV/UPM-BP/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Ruhansyah
NIM	: 210311020092
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Penanganan dan Problematika Eksekusi Pada Jaminan Kebendaan dan Perorangan di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam Tinjauan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil **kurang dari 20%** Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA**.
Banjarmasin, 09 Juni 2026

Wakil Direktur Pascasarjana


Dr. Wahyudin, M.Pd.I.

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul “Penanganan Dan Problematika Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam Tinjauan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum” ditulis oleh Rubansyah NIM. 210311020092 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin:

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 Juni 2026



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1 Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Ketua)	
2 Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI (Penguji Utama)	
3 Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Penguji)	
4 Dr. Muhammad Nafi, S.Pd, S.H.I, S.H, M.Sy (Penguji Eksternal)	
5 Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H (Penguji)	
6 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (Penguji)	
7 Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, M.A (Penguji/Sekretaris)	

ABSTRAK

Ruhansyah: NIM 210311020092, Penanganan dan Problematika Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan dan Perorangan di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Tinjauan Antropolgi Hukum dan Sosiologi Hukum. Disertasi. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Jalaluddin. M. Hum dan Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Program Studi Ilmu Syariah. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata kunci: *Problematika, Eksekusi, Perkara, Jaminan Kebendaan dan non jaminan Kebendaan.*

Praktik eksekusi perdata sering kali menghadapi berbagai hambatan sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Studi ini bertujuan menganalisis penanganan serta problematika eksekusi perkara yang berkaitan dengan jaminan kebendaan dan perorangan. Metode di studi ini ialah hukum empiris dengan pendekatan analisis yuridis, serta penghimpunan data lewatobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang dipakai di studi ini ialah teori antropologi hukum dan sosiologi hukum dengan analisis kualitatif untuk memahami hubungan antara hukum dan praktik sosial dalam masyarakat.

Hasil studi memperlihatkan kasus eksekusi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan mencakup perkara hak tanggungan, warisan, harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah dan menyimpulkan proses eksekusi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan masih menghadapi kendala praktis, prosedural, dan sosial kultural yang memerlukan strategi penanganan khusus. Studi ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan persoalan eksekusi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan bukan saja sebagai masalah yuridis formal, tapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh dinamika antropologis dan sosiologis masyarakat setempat, melalui pemetaan rinci pada 18 problematika utama sebagai dasar perumusan strategi penanganan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepastian hukum.

Dari perspektif antropologi hukum, ditemukan hambatan eksekusi tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal masyarakat Kalimantan Selatan. Nilai-rasa malu, relasi kekeluargaan, pluralism hukum, dan relasi sosial antara pihak berperkara sering mempengaruhi penerimaan masyarakat pada tindakan eksekusi. Pola budaya ini menyebabkan aparat pengadilan harus berhadapan dengan tekanan sosial, negosiasi informal, atau penolakan simbolik yang memperlambat proses eksekusi. Sementara itu, melalui sosiologi hukum, studi ini mengungkap efektivitas eksekusi bukan saja ditetapkan aturan hukum, tapi juga oleh lemahnya kepatuhan dan kesadaran pada hukum bahkan ketidakpercayaan pada lembaga hukum, serta faktor ekonomi dan kekuasaan, dan Upaya untuk mempertahankan hak yang menyebabkan terhalangnya eksekusi. Studi ini menawarkan solusi untuk menghindari konflik dengan menerapkan adat badamai dengan pendekatan fungsionalisme.

ABSTRACT

Ruhansyah: NIM 210311020092, The Enforcement And Problematics Of The Execution Of Property And Personal Guarantees In The Religious Courts Of South Kalimantan: A Legal Anthropology And Sociology Of Law Perspective. Dissertation. Supervised by Prof. Dr. Jalaluddin, M.Hum. and Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Doctoral Program In Sharia Studies, Postgraduate Program Of UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Keywords: *Problematic, Execution, Property Guarantees, and Personal Guarantees.*

This study examines the enforcement and legal problems surrounding the execution of cases involving property and personal guarantees in the Religious Courts of South Kalimantan. In practice, the execution of civil judgments frequently encounters various obstacles, as reflected in the Religious Courts within the region. This research aims to analyze both the handling and the underlying problems of execution proceedings related to proprietary and personal guarantees. The study employs an empirical legal research method with a juridical-analytical approach, while data were collected through observation, interviews, and documentation. The theoretical frameworks applied in this research are legal anthropology and sociology of law, using qualitative analysis to understand the relationship between legal norms and social practices within society.

The findings reveal that execution cases in the Religious Courts of South Kalimantan include disputes concerning security rights over land (*hak tanggungan*), inheritance, joint marital property, child custody, and maintenance obligations. The study concludes that the execution process in the Religious Courts of South Kalimantan continues to face practical, procedural, and socio-cultural constraints that require specific handling strategies. The novelty of this research lies in positioning execution issues in the Religious Courts not merely as formal juridical problems, but also as phenomena influenced by the anthropological and sociological dynamics of the local community. This is demonstrated through a detailed mapping of eighteen major legal and social problems as the basis for formulating more effective enforcement strategies oriented toward legal certainty.

From the perspective of legal anthropology, the study finds that barriers to execution cannot be separated from the local cultural context of South Kalimantan society. Values related to shame, kinship relations, legal pluralism, and social relations between litigating parties frequently influence public acceptance of execution measures. These cultural patterns compel court officials to confront social pressure, informal negotiations, and symbolic resistance that delay the execution process. Meanwhile, from the perspective of the sociology of law, the research reveals that the effectiveness of execution is determined not only by legal regulations, but also by weak legal compliance and legal awareness, distrust toward legal institutions, economic and power-related factors, as well as attempts by parties to maintain control over disputed rights, all of which obstruct the enforcement process. This study further proposes the application of the local customary dispute-resolution mechanism known as *adat badamai* through a functionalism approach as an alternative solution to minimize conflict in the execution process.

خلاصة

روحانسيه: الرقم الجامعي ٢٠٠٩٢٠٢٠٣١١٠٢١، المعالجة والإشكاليات في تنفيذ الضمانات العينية والشخصية في المحكمة الدينية بكاليمانتان الجنوبية في ضوء الأنثروبولوجيا القانونية وعلم اجتماع القانون. أطروحة دكتوراه. الأستاذ المشرف البروفيسور الدكتور جلال الدين، م. هوم، والدكتورة الحاجة أميليا رحمانية، م. هـ. UIN برنامج دراسة العلوم الشرعية. الدراسات العليا بجامعة أنتساري بنجرماسين. ٢٠٢٦

غالبًا ما تواجه ممارسات تنفيذ الأحكام المدنية مختلف العقبات كما يحدث في المحكمة الدينية في كاليمانتان الجنوبية. يهدف هذا البحث إلى تحليل آليات المعالجة والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ القضايا المرتبطة بالضمانات العينية والشخصية. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو القانون التجريبي مع مقارنة التحليل القانوني، إضافة إلى جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. أما النظريات المستخدمة في هذا البحث فهي نظرية الأنثروبولوجيا القانونية وعلم الاجتماع القانوني، مع تحليل نوعي لفهم العلاقة بين القانون والممارسات الاجتماعية في المجتمع تُظهر نتائج البحث أن حالات التنفيذ في محكمة الشريعة الإسلامية في كاليمانتان الجنوبية تشمل قضايا حقوق الرهن العقاري، والميراث، والأموال المشتركة، وحضانة الأطفال، والنفقة، وتخلص إلى أن عملية التنفيذ في محكمة الشريعة الإسلامية في كاليمانتان الجنوبية لا تزال تواجه عقبات عملية وإجرائية وثقافية اجتماعية تتطلب استراتيجيات معالجة خاصة. يقدم هذا البحث جديدًا يتمثل في وضع مشكلة التنفيذ في محكمة الشريعة الإسلامية في كاليمانتان الجنوبية ليس فقط كمسألة قانونية شكلية، بل أيضًا كظاهرة تتأثر بالديناميكيات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية للمجتمع المحلي، من خلال رسم خريطة تفصيلية لـ ١٨ إشكالية رئيسية كأساس لصياغة استراتيجيات معالجة أكثر فاعلية وموجهة نحو تحقيق اليقين القانمن تُظهر نتائج البحث أن حالات التنفيذ في محكمة الشريعة الإسلامية في كاليمانتان الجنوبية تشمل قضايا حقوق الرهن العقاري والميراث، والأموال المشتركة، وحضانة الأطفال، والنفقة، وتخلص إلى أن عملية التنفيذ في محكمة الشريعة الإسلامية في كاليمانتان الجنوبية لا تزال تواجه عقبات عملية وإجرائية وثقافية اجتماعية تتطلب استراتيجيات معالجة خاصة. منظور الأنثروبولوجيا القانونية، تبين أن عوائق التنفيذ لا يمكن فصلها عن السياق الثقافي المحلي لمجتمع كاليمانتان الجنوبية. فقيم الشعور بالعار، والعلاقات الأسرية، وتعدد الأنظمة القانونية، والعلاقات الاجتماعية بين أطراف النزاع غالبًا ما تؤثر في قبول المجتمع لإجراءات التنفيذ. ويؤدي هذا النمط الثقافي إلى مواجهة موظفي المحكمة لضغوط اجتماعية ومفاوضات غير رسمية، ورفض رمزي يبطئ عملية التنفيذ في الوقت نفسه، ومن خلال علم اجتماع القانون، يكشف هذا البحث أن فعالية التنفيذ لا تتحدد فقط بالقواعد القانونية بل أيضاً بضعف الامتثال والوعي القانوني، بل وحتى انعدام الثقة في المؤسسات القانونية، إضافة إلى العوامل الاقتصادية والسلطوية، ومحاولات الحفاظ على الحقوق التي تؤدي إلى تعطيل التنفيذ. ويقدم هذا البحث حلاً لتجنب النزاع من خلال تطبيق العرف «باداماي» باستخدام مقارنة الوظيفية

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam atas segala nikmat, karunia dan anugerah-Nya yang sudah diberi pada hamba serta tidak terhitung jumlahnya. Shalawat serta salam pada Rasulullah saw. manusia mulia pembawa cahaya hidayah untuk seluruh manusia. Demikian pula seluruh keluarga, shahabat dan semua orang yang menata dan meniti hidupnya sesuai risalahnya.

Disertasi ini ialah hasil kerja keras dan perjuangan pada Program Doktorat Jurusan Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. Dedikasi karya ini merupakan salah satu usaha pengembangan bagi studi agama Islam khususnya di bidang hukum Perdata Islam yang berkaitan dengan permasalahan eksekusi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Syukur tiada terkira pada Allah ta'ala atas segala nikmat dan anugerah-Nya. Ucapan Terima kasih saya sampaikan pada seluruh pihak yang sudah memberi dukungan berupa doa, motivasi dan bimbingan hingga terselesaikannya disertasi ini terutama pada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. Hj Nida Mufidah, M.Pd
2. Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A.
3. Bapak Prof. Dr. Jalaluddin. M. Hum dan Dr.Hj.Amelia Rahmaniah, M.H. yang sudah memberi saran, masukan, bimbingan dan motivasinya.
4. Narasumber yang berkenan menyediakan waktu wawancara dengan bertatap muka secara langsung baik di Pengadilan Agama atau di luar pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan. Terutama pada Ibunda Hikmah, S.Ag, M.Sy selaku Ketua pengadilan Agama Martapura yang selalu membimbing penulis kapan dan dimana pun berada. Syukran Jazilan pada beliau
5. Teman-teman kuliah pasca sarjana S-3 Ilmu Syariah UIN Antasari angkatan tahun 2021 yang saling memotivasi, menginspirasi dan memberi support system terbaik dalam membantu kelancaran studi ini.
6. Ayahnda Syahrudin (alm) yang sudah memberi wasiat pada penulis untuk melanjutkan pendidikan S3 dan Ibunda Rohana yang senantiasa

memotivasi dan tak putus mendoakan. Semoga Ibunda diberi umur yang panjang dalam kesehatan, ‘afiyah dan barokah serta disempatkan menunaikan ibadah haji. Aamiin.

7. Istri Dara Shinta, S.Th.I dan Buah hati tercinta dan tersayang Muhammad Zein El-Mubarak dan Aisyah Hana El-Zahra. Semoga kalian menjadi anak-anak yang shalih shalihah, faqih fiddin, menjadi penjaga al-Quran yang mulia dan menjadi pembela Islam yang terpercaya. *Aamiin*

Akhirnya, saya berharap dan berdoa semoga karya ini menjadi karya yang bermanfaat. Khususnya bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Memberi kontribusi bagi kepastian hukum Islam, khususnya fatwa tentang perbankan syariah. Hanya dengan syariah hidup kita akan menjadi berkah. Semoga keberkahan senantiasa menyertai amal kita, bangsa dan negara kita. Aamiin.

Banjarmasin, 30 Mei 2026

Penulis,

Ruhansyah

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada studi ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No.: 158 Tahun 1987 dan No.: 0543b/U/1987.

No	Huruf Arab	Latin	No	Huruf Arab	Latin
1	أ	A	16	ط	Th
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	.
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	ء
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Ketentuan alih aksara vokal tunggal yakni:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	<i>Fathah</i>
ـِ	i	<i>Kasrah</i>
ـُ	u	<i>Dhammah</i>

Kata sandang: Contoh: (الشمس) *al-Syamsu* bukan *asy-syamsu*. Syiddah: contohnya, kata (النَّجْم) ditulis *al-najmu* bukan *an-najmu*. Ketentuan alih aksara vokal rangkap yakni:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Alih aksara vokal panjang (*mad*) ketentuannya yakni.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	Â	a dengan topi di atas
ـِـِ	Î	i dengan topi di atas
ـُـُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah atau huruf kamariah. Contoh: *al-kitâb*, *al-raddu*

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* dialih dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah*. Kecuali bila huruf yang menerima tanda *syiddah* itu ada sesudah kata

sandang yang diikuti huruf-huruf syamsiyah. Contohnya, kata (النَّجْم) ditulis al-najmu bukan an-najmu.

5. *Ta Marbûthah*

Bila huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri atau bila *ta marbûthah* itu diikuti kata sifat (na‘t), maka huruf itu dialihaksarakan jadi huruf /h/ (contoh 1 dan 2). Bila huruf *ta marbûthah* itu disambung dengan kata/huruf sesudahnya, maka *ta marbûthah* itu menjadi huruf /t/ (contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tharîqah</i>
2	الجامعة الإسلامية	<i>Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>Wahdat al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Nama Dalam penulisan nama, khususnya nama diri yang diawali dengan kata sandang, huruf kapital hanya dipakai pada awal nama diri itu sendiri. Misalnya, kita menulis al-Ghazali, bukan *Al-Ghazali*, dan al-Banjari, bukan *Al-Banjari*. Bagi nama tokoh dari Nusantara, sebaiknya nama itu tidak dialihaksarakan ke bentuk Arab formal, meskipun asal katanya memang dari bahasa Arab. Contohnya, kita menulis Abdussamad al-Palimbani, bukan *‘Abd al-Samad al-Palimbânî*, serta Nuruddin al-Raniri, bukan *Nûr al-Dîn al-Rânîr*. Dengan demikian, penulisan nama tetap menghormati asal-usul tokoh sekaligus memudahkan pembaca Nusantara memahami identitas mereka.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	x
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	23
PENDEKATAN TEORETIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG EKSEKUSI, ANTROPOLOGI HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM	23
A. TEORI EKSEKUSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA.....	23
1. Pengertian Eksekusi.....	23
2. Dasar Hukum Eksekusi	25
3. Asas-Asas Eksekusi.....	27
4. Jenis- Jenis Eksekusi	28
5. Pendelegasian Eksekusi.....	52
6. Bentuk-Bentuk Eksekusi	53
B. JAMINAN DALAM HUKUM PERDATA.....	106
1. Jaminan Umum dan Khusus	107
2. Jaminan Kebendan dan Perorangan.....	108
3. Jaminan Bergerak dan Tidak Bergerak	109
4. Jaminan Menguasai Benda dan Tidak Menguasai	111
5. Jaminan Regulatif dan Non Regulatif	112

6. Jaminan Eksekutorial dan Non Eksekutorial.....	112
C. ANTROPOLOGI HUKUM.....	113
1. Pengertian Antropologi Hukum	114
2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum.....	115
3. Pendekatan Antropologi Hukum	117
4. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman	120
5. Islam dan Masyarakat Banjar	126
D. SOSIOLOGI HUKUM	136
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	136
2. Objek Kajian Sosiologi Hukum.....	140
3. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	142
4. Fungsi Sosiologi Hukum	143
5. Teori Efektifitas Hukum	144
BAB III.....	150
METODE PENELITIAN	150
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	150
B. Lokasi Penelitian	152
C. Data dan Sumber Data.....	153
D. Teknik Pengumpulan Data	154
E. Teknik Analisis Data	158
BAB IV	160
PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA YANG TERJADI DI	
KALIMANTAN SELATAN DALAM TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM	
DAN SOSIOLOGI HUKUM.....	160
A. PENANGANAN DAN PROBLEMATIKA EKSEKUSI PENGADILAN	
AGAMA KALIMANTAN SELATAN	160
1. PENANGANAN EKSEKUSI	160
a. Pengadilan Agama Banjarmasin.....	160
b. Pengadilan Agama Banjarbaru	171
c. Pengadilan Agama Martapura	181

d. Pengadilan Agama Batulicin	188
e. Pengadilan Agama Marabahan	194
2. PPROBLEMATIKA EKSEKUSI	195
a. Pengadilan Agama Banjarmasin	195
b. Pengadilan Agama Banjarbaru	196
c. Pengadilan Agama Martapura	196
d. Pengadilan Agama Batulicin	197
e. Pengadilan Agama Marabahan	197
B. TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM PADA PROBLEMATIKA EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN.....	199
1. Budaya Malu dan Harga Diri (<i>Honour Culture</i>)	200
2. Relasi Kekeluargaan (<i>Bubuhan</i>).....	201
3. Pluralisme Hukum (<i>Hibah Lisan</i>)	204
4. Struktur Patriarki	206
5. Mempertahankan Hak.....	208
6. Lemahnya Kepatuhan Pada Hukum	208
7. Kurang Percaya pada Lembaga Hukum	210
8. Faktor Ekonomi	211
BAB V.....	222
PENUTUP.....	222
A. Kesimpulan.....	222
B. Saran.....	225
DAFTAR PUSTAKA	226
LAMPIRAN-LAMPIRAN	242